KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SEKRETARIAT

Nomor SOP	:	AHU.1.OT.02.02-61
Tanggal Pembuatan	:	5 April 2018
Tanggal Revisi	:	9 November 2022
Tanggal Efektif	:	19 Juni 2023
Disahkan Oleh	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum M. Aliamsyah NIP. 196805121991031002
NAMA SOP	:	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB No. 12 Tahun 2015 tetang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3 Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	1. Memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. Memahami prosedur rekonsiliasi laporan keuangan 3. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
	1. PC/Laptop 2. Printer 3. Alat tulis 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila prosedur tidak dijalankan, maka pelaporan keuangan Direktoat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIGITALISASI DOKUMEN

No	Aktivitas/Kegiatan	Inspektorat Jenderal	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	Kepala Sub Bagian	Pelaksana Sub Bagian Akuntansi & Pelaporan	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan dokumen kelengkapan untuk penyusunan laporan kepada Unit Eselon I				MULAI	Konsep Surat/ Nota dinas	1 hari	Surat/ Nota dinas	
2	Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen penyusunan laporan keuangan					Surat/ Nota dinas	1 hari	Dokumen bahan penyusun laporan keuangan lengkap	
3	Melakukan Rekonsiiasi tingkat Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					Dokumen bahan penyusun laporan keuangan	3 hari	Hasil rekonsiliasi tingkah wilayah	
4	Menerbitkan BAR Tingkat Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					Hasil rekonsiliasi tingkah wilayah	1 Jam	Berita Acara Rekonsiliasi	
5	Melakukan rekonsiliasi tingkat Eselon I					Dokumen bahan penyusun laporan keuangan	3 hari	Hasil rekonsiliasi tingkah wilayah	
6	Menyusun Laporan Keuangan Tingkat Eselon I					Dokumen bahan penyusun laporan keuangan	1 hari	Laporan keuangan tingkat eselon I	
7	Reviu dengan Inspektorat Jenderal					Laporan keuangan tingkat eselon I	3 hari	Hasil reviu Inspektorat Jenderal	
8	Menerima CHR dan Menindaklanjuti CHR					Hasil reviu Inspektorat Jenderal	1 hari	Catatan hasil reviu	
9	Menyampaikan Laporan Keuangan ke BPK					Dokumen bahan penyusun laporan keuangan, CHR	1 hari	Laporan Keuangan	
10	Menerima hasil audit BPK					Laporan Keuangan	1 hari	Hasil audit	
11	Menindaklanjutin temuan BPK					Hasil audit - temuan BPK	5 hari	TL temuan	
12	Menyusun Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Audited			SELESAI		Dokumen bahan penyusun laporan keuangan, TL temuan	5 hari	Laporan keuangan tingkat eselon I audited	